SURVEI PERUSAHAAN HORTIKULTURA DAN USAHA HORTIKULTURA LAINNYA

PEDOMAN TEKNIS

BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI PERUSAHAAN HORTIKULTURA DAN USAHA HORTIKULTURA LAINNYA

PEDOMAN TEKNIS

KATA PENGANTAR

Survei Perusahaan Hortikultura (VP-Horti) dan Usaha Hortikultura Lainnya (VN- Horti) merupakan survei yang dilaksanakan untuk memperoleh data produksi dari perusahaan dan usaha hortikultura lainnya. Survei ini dilaksanakan rutin setiap tahun.

Buku pedoman ini memuat penjelasan teknis dalam melakukan kegiatan VP-Horti dan VN-Horti yang meliputi latar belakang kegiatan, tujuan, cakupan, jadwal pelaksanaan, metodologi, dan tahapan kegiatan VP-Horti dan VN-Horti dari persiapan sampai penyajian data.

Keberhasilan pelaksanaan survei ini ditentukan oleh niat, tekad, dan kesungguhan kita semua. Oleh karena itu, para penanggungjawab kegiatan VP-Horti dan VN-Horti, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten agar melaksanakan tugas dengan profesional, integritas, dan amanah serta penuh tanggung jawab.

Akhirnya, atas kontribusi semua pihak dalam pelaksanaan Survei VP-Horti dan VN-Horti diucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2019

Deputi Bidang Statistik Produksi
Badan Pusat Statistik,

M. Habibullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Sasaran 2
1.4 Landasan Hukum 2
1.5 Cakupan 3
1.6 Kegiatan 3
1.7 Petugas 4
1.8 Instrumen yang Digunakan 4
1.9 Jadwal Kegiatan 5
BAB II METODOLOGI 7
2.1 Direktori Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 7
BAB III ORGANISASI 9
3.1 Organisasi di Pusat 9
3.2 Organisasi di Provinsi 10
3.3 Organisasi di Kabupaten 11
3.4 Organisasi Lapangan 13
BAB IV TAHAPAN KEGIATAN 15
4.1 Updating/pemutakhiran direktori Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 15
4.2 Pencacahan 16
4.3 Pengawasan 17
4.4 Editing Coding 19

4.5 Entry 19
4.6 Publikasi 19
BAB V PENGELOLAAN INSTRUMEN 21
5.1 Jenis Perlengkapan 21
5.2 Pengelolaan 21
5.3 Hasil Pencacahan 21
BAB VI PENUTUP 23
6.1 Penutup 23

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dampak pembangunan ekonomi, struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu bagian penting dari sektor pertanian adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura mencakup tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat. Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang cukup potensial dikembangkan secara agribisnis karena mempunyai nilai ekonomis dan nilai tambah yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain itu, data hortikultura sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan baik oleh kementerian/lembaga terkait maupun *stakeholder* lain yang bergerak di subsektor hortikultura. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban untuk menyediakan data hortikultura yang berkualitas yang dibutuhkan kementerian/ lembaga terkait dan *stakeholder* lainnya.

Pengumpulan data hortikultura dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, perusahaan, dan usaha hortikultura lainnya (sekolah, pondok pesantren, dll). Pengumpulan data hortikultura dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun pada kegiatan Sensus Pertanian. Sementara itu, pengumpulan data hortikultura dengan pendekatan perusahaan dan usaha hortikultura lainnya diperoleh dari Survei Perusahaan Hortikultura (VP-HORTI) dan Survei Usaha Hortikultura Lainnya (VN-HORTI) yang dilaksanakan setiap tahun. Tujuan dari survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah untuk mendapatkan direktori perusahaan hortikultura yang berbadan hukum, direktori usaha hortikultura lainnya,

data produksi, nilai produksi, dan tenaga kerja pada perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah:

1. Memperoleh direktori perusahaan hortikultura yang berbadan hukum, direktori usaha hortikultura lainnya, jumlah perusahaan hortikultura yang berbadan hukum, jumlah usaha hortikultura lainnya, data produksi, nilai produksi, dan tenaga kerja pada perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya.
2. Memenuhi kebutuhan pemakai data tentang informasi perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya saat ini.

1.3 Sasaran

Sasaran Survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah tersedianya data terkait perusahaan yang berbadan hukum maupun usaha non rumah tangga/usaha hortikultura lainnya.

1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum pelaksanaan VP-HORTI dan VN-HORTI adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683).
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854).
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
d. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.

e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

1.5 Cakupan

Cakupan Survei VP-HORTI dan VN-HORTI dijabarkan sebagai berikut.

a. Wilayah

Wilayah pelaksanaan Direktori perusahaan Hortikultura dilaksanakan di 34 provinsi.

b. Periode Data

Data dikumpulkan pada rentang waktu Januari – Desember 2018 dengan periode triwulanan.

c. Komoditas

Komoditas yang dicakup dalam Survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah semua komoditas hortikultura yaitu tanaman sayuran semusim dan tahunan, tanaman buah-buahan semusim dan tahunan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias (florikultura).

1.6 Kegiatan

Secara garis besar, kegiatan lapangan VP-HORTI dan VN-HORTI meliputi :

a. Updating perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya.

   BPS RI mengirim direktori perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya ke BPS Provinsi. BPS Provinsi mengirim direktori perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya ke BPS Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten/Kota melakukan updating direktori dan pencacahan perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya dengan kuesioner VP-HORTI (perusahaan yang berbadan hukum) dan VN-HORTI (usaha hortikultura lainnya) .

b. *Editing* dan *coding* dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI.

   BPS Kabupaten/Kota melakukan *editing* dan *coding* dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI yang sudah diisi oleh perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya.

c. Entri dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI.

BPS Provinsi melakukan entri dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI yang telah diedit oleh BPS Kabupaten/Kota.

1.7 Petugas

Petugas yang terlibat pada Survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah :

a. Petugas yang terlibat dalam kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI di lapangan adalah penanggung jawab teknis, petugas pemeriksa, dan petugas pencacah.

b. Petugas penanggung jawab pengelolaan data di BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota

1.8 Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan pada VP-HORTI dan VN-HORTIterdiri dari instrumen pencacahan, buku pedoman, dan instrumen pendukung, yaitu:

a. Instrumen Pencacahan

1) Direktori perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya

Daftar ini berisi nama dan alamat perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang aktif pada pencacahan yang dilakukan oleh BPS pada tahun sebelumnya.

2) Kuesioner VP-HORTI

Dokumen ini digunakan untuk pencacahan perusahaan hortikultura yang masih aktif. Dalam kuesioner sudah mencakup konsep dan definisi yang digunakan petugas pencacah lapangan. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang luas tanaman, jumlah tanaman, produksi, dan tenaga kerja perusahaan hortikultura berbadan hukum.

3) Kuesioner VN-Horti

Dokumen ini digunakan untuk pencacahan usaha hortikultura lainnya (NRT) yang masih aktif. Dalam kuesioner sudah mencakup konsep dan definisi yang digunakan petugas pencacah lapangan. Kuesioner ini digunakan untuk

memperoleh informasi tentang luas tanaman, jumlah tanaman, produksi, dan tenaga kerja usaha hortikultura lainnya.

b. Buku Pedoman

Pedoman yang digunakan dalam VP-HORTI dan VN-HORTI yaitu,

1) Pedoman Pencacahan VP-HORTI dan VN-HORTI

   Pedoman ini berisi tata cara pengisian kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI yang harus dijadikan pedoman oleh pencacah.

2) Pedoman teknis

   Pedoman teknis digunakan oleh BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.

c. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang digunakan dalam Survei VP-HORTI dan VN-HORTI yaitu aplikasi monitoring *online* yang digunakan untuk memantau progres kegiatan lapangan dan evaluasi data hasil pencacahan.

1.9 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pendistribusian dokumen	Februari
2	Pencacahan lengkap Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya	April s.d. Juni
3	Pemutakhiran Direktori Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya	April s.d. Juni
4	Absensi, *batching*, *editing* dan *coding* di BPS Kabupaten/Kota/Kota	Mei – Juli
5	*Entry* data di BPS Propinsi	Mei – Juli
7	Evaluasi dan validasi di BPS Propinsi	Juli - Agustus
8	Pengiriman data base ke BPS RI	Juli - Agustus
9	Kompilasi data di BPS RI	Agustus – September

No.	Kegiatan	Jadwal
10	Evaluasi dan validasi di BPS RI	Agustus – September
11	Tabulasi di BPS RI	Oktober
12	Penyusunan *draft* publikasi di BPS RI	Oktober
13	Percetakan di BPS RI	November

METODOLOGI 2

2.1 Direktori Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya

Pengumpulan data perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya dilakukan secara sensus di seluruh indonesia dan dilakukan setiap tahun. Data yang dikumpukan meliputi nama perusahaan hortikultura, status badan hukum, jenis komoditas yang diusahakan, luas lahan yang diusahakan untuk tanaman hortikultura produksi dan jumlah tenaga kerja.

Direktori perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang dicakup dalam digunakan pada survei VP-HORTI dan VN-HORTI adalah hasil pemutakhiran direktori dari survei tahun sebelumnya yang berstatus aktif, baru, tutup sementara dan non respon. Sementara itu perusahaan hortikultura atau usaha hortikultura lainnya yang berstatus tutup, tidak ditemukan dan alih usaha hortikultura lainnya dikeluarkan dari direktori yang akan digunakan pada survei tahun berjalan.

Semua perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang terdapat di direktori tahun tahun berjalan dicacah lengkap di seluruh indonesia dengan menggunakan kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI.

3 ORGANISASI

Organisasi lapangan disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Survei VP-HORTI dan VN-HORTI: (a) dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya; (b) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan (c) setiap pelaku dalam organisasi mengetahui dengan pasti tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing.

3.1 Organisasi di Pusat

Penanggung jawab teknis dan pemantauan progress hasil lapangan kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI yaitu Deputi Bidang Statistik Produksi dibantu Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) dan penanggung jawab di bidang teknologi dan pengolahan adalah Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS). Hasil pantauan data dapat diinformasikan ke Deputi Bidang Statistik Produksi dan jika diperlukan dilakukan supervisi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing direktorat adalah sebagai berikut :

a. **Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP)**

   Subdirektorat Statistik Hortikultura

   1) Melakukan perencanaan kerangka acuan kerja, pengelolaan anggaran, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
   2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sampai hasil kegiatan.
   3) Mengelola seluruh tahapan uji coba program VP-VN Horti.
   4) Melakukan koordinasi dengan BPS provinsi dan kabupaten.
   5) Menyiapkan kuesioner, rule validasi, rancangan tabulasi, dan buku pedoman.

6) Melakukan analisis dan menyusun publikasi hasil kegiatan.
7) Memantau kelancaran Survei VP-HORTI dan VN-HORTI.
8) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

b. Direktorat Sistem Informasi Statistik

1) Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data (IPD)
   a) Menyusun dan mengelola sistem dan program pengolahan VP-HORTI dan VN-HORTI serta aplikasi *web monitoring* pelaksanaan kegiatan dan hasil.
   b) Mengkoordinir pelaksanaan uji coba program.
   c) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat dan daerah
   d) Menerima hasil pengolahan data dari daerah
   e) Mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan
   f) Mengirimkan rawdata hasil pelaksanaan lapangan ke *subject matter*
   g) Menyajikan hasil pengolahan
   h) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2) Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data (JKD)
   a) Menyiapkan desain konfigurasi server.
   b) Mengkoordinir keamanan komunikasi data antar pusat dan daerah.
   c) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

3.2 Organisasi di Provinsi

Penanggung jawab secara keseluruhan di daerah adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Produksi dan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan, Diseminasi Statistik (IPDS) dan Kepala Bagian Tata Usaha. Penanggung jawab teknis dan pemantauan progress hasil lapangan kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI yaitu Kepala Bidang Statistik Produksi dibantu kepala seksi pertanian. Penanggung jawab di bidang teknologi dan pengolahan adalah Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Bagian

Tata Usaha dibantu oleh kepala seksi di bagian tata usaha. Hasil pantauan data dapat diinformasikan ke Kepala BPS provinsi dan jika diperlukan dilakukan Verifikasi data atau kunjungan ulang ke lapangan.

BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Bidang Produksi melakukan koordinasi dan memberi petunjuk Kepala BPS Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Survei VP-HORTI DAN VN-HORTI dan berkoordinasi langsung dengan Subdit Statistik Hortikultura BPS.
b. Bidang Produksi mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan VP-HORTI DAN VN-HORTI , melakukan distribusi kuesioner dan direktori VP-HORTI dan VN-HORTI yang diterima dari BPS.
c. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi bertugas memberikan dukungan kegiatan pengolahan data dalam hal infrastruktur dan jaringan pengolahan
d. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik bekerja sama dengan Bidang Statistik Produksi untuk melakukan pengawasan dan memantau data hasil pencacahan.
e. Bidang Produksi melakukan entri kuesioner VP-Horti dan/atau VN-Horti setelah dilakukan pencacahan, *batching*, *editing*, dan *coding* oleh BPS Kabupaten/Kota.
f. Membuat laporan kegiatan VP-HORTI DAN VN-HORTI secara keseluruhan.
g. Mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
h. Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS, serta petunjuk dalam buku pedoman.

3.3 Organisasi di Kabupaten

Penanggung jawab secara keseluruhan di Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Seksi Statistik Produksi, Kepala seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Penanggung jawab teknis dan pemantauan progress hasil lapangan kegiatan VP-

HORTI dan VN-HORTI yaitu Kepala seksi Statistik Produksi, penanggung jawab di bidang teknologi dan pengolahan adalah kepala seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) dan Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Hasil pantauan data diinformasikan ke Kepala BPS Kabupaten/Kota dan jika diperlukan dapat dilakukan Verifikasi data atau kunjungan ulang ke lapangan.

Penanggung Jawab secara keseluruhan di tingkat kabupaten adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPS Kabupaten/Kota secara teknis dibantu oleh Kepala Seksi Statistik Produksi dan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Melaksanakan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi yang meliputi seluruh tahapan kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI .
b) Melakukan koordinasi dengan Camat dan atau Kepala Desa/Lurah, dan instansi/perusahaan terkait kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI .
c) Membuat daftar alokasi tugas pencacah dan pemeriksa wilayah yang menjadi tugas.
d) Melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan lapangan.
e) Mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI serta melakukan distribusi kuesioner dan direktori VP-HORTI dan VN-HORTI yang diterima dari BPS Provinsi kepada petugas pencacah dan pemeriksa.
f) Melakukan *batching, editing, coding*, dan pemeriksaan kewajaran dan konsistensi data hasil pencacahan lapangan.
g) Melakukan monitoring kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI .
h) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.
i) Membuat laporan kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTI secara keseluruhan.

j) Melakukan tugas yang diperintahkan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan BPS Provinsi, serta petunjuk dalam buku pedoman.

3.4 Organisasi Lapangan

Pelaksanaan lapangan Survei VP-HORTI dan VN-HORTI dilakukan oleh petugas pemeriksa dan petugas pencacah.

a. Petugas Pemeriksa

Petugas pemeriksa adalah staf dan/atau KSK. PMS memiliki tugas sebagai berikut.

1) Menerima surat tugas dan tanda pengenal dari BPS Kabupaten/Kota.
2) Menerima kuesioner dan direktori VP-HORTI dan VN-HORTI dari BPS Kabupaten/Kota.
3) Mengalokasikan kuesioner dan direktori VP-HORTI dan VN-HORTI ke pencacah.
4) Melakukan pengawasan/pendampingan terhadap PCS secara bergiliran yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa pencacahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5) Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI yang telah dicacah oleh petugas pencacah. Termasuk menambahkan catatan yang diperlukan.
6) Mengonfirmasi/mengembalikan kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI bila masih ada yang dinyatakan salah pengisian kepada pencacah dan memberikan catatan tentang kesalahan, serta hal ini dilakukan sampai pekerjaan PCS yang menjadi tanggung jawabnya selesai.
7) Senantiasa berkomunikasi dan berdiskusi dengan PCS dan Kasi Statistik Produksi tentang kemajuan dan permasalahan lapangan yang terjadi pada kegiatan listing dan pencacahan.
8) Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

9) Melaksanakan tugas, perintah langsung maupun tidak langsung dari Pimpinan BPS Kabupaten, serta petunjuk dalam buku pedoman.

b. Petugas Pencacah

Pencacah merupakan petugas lapangan yang bertugas mewawancarai responden. Pencacah adalah staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Pencacah memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menerima instrumen, kuesioner dan direktori VP-HORTI dan VN-HORTI .
2) Menerima surat tugas dari BPS Kabupaten.
3) Melakukan pencacahan sesuai alokasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan dengan prosedur yang ditetapkan.
4) Memperbaiki Daftar VP-Horti dan/atau VN-Horti yang diperiksa oleh pemeriksa atau melakukan konfirmasi isian dengan melakukan kunjungan ulang ke perusahaan/usaha hortikultura lainnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan sampai tidak ditemukan lagi kesalahan dan mendiskusikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
5) Senantiasa berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemeriksa tentang kemajuan dan permasalahan lapangan yang terjadi pada kegiatan pencacahan.
6) Mematuhi mekanisme, tahapan, jadwal waktu yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemeriksa atau perintah langsung maupun tidak langsung dari Pimpinan BPS Kabupaten/Kota, serta petunjuk dalam buku pedoman.

TAHAPAN KEGIATAN 4

Semua perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya dicacah lengkap di seluruh indonesia dengan menggunakan kuesioner VP-HORTI2018 dan VN-HORTI2018. Tahapan kegiatan survei perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya adalah sebagai berikut :

4.1 Updating/pemutakhiran direktori Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya

BPS mengirimkan Direktori VP-HORTI dan VN-HORTI ke BPS Provinsi pada awal tahun. Sebelum digunakan untuk pelaksanaan lapangan, direktori ini perlu dilakukan *updating* untuk pelaksanaan pencacahan tahun berjalan dan pembuatan direktori tahun selanjutnya. *Updating* Direktori VP-HORTI dan VN-HORTI dilakukan berjentang dari BPS, BPS Provinsi sampai BPS Kabupaten/Kota. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan jumlah dan status perusahaan hortikultura/usaha hortikultura lainnya pada tahun berjalan. Mekanisme *updating* sebagai berikut:

1. BPS Provinsi berkoordinasi dengan BPS Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan direktori.
2. BPS Kabupaten/Kota melakukan *updating* direktori. *Updating* dapat dilakukan dengan bertanya ke narasumber seperti Kementrian dan dinas pertanian, instansi terkait, aparat desa dan sumber informasi lainnya atau langsung ke lapangan bersamaan dengan pengantaran kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI ke prusahaan hortikultura/usaha hortikultura lainnya.
3. Petugas pencacahan melakukan identifikasi status perusahaan apakah aktif, perusahaan baru, tutup sementara/tidak ada kegiatan, belum berproduksi, tidak ditemukan, alih usaha ke non hortikultura, bukan usaha hortikultura/tutup dan perusahaan baru hortikultura. Jika ada perusahaan hortikultura/usaha hortikultura lainnya yang baru maka tambahkan pada direktori.

4. BPS Kabupaten membuat rekapitulasi ada tidaknya perubahan status keberadaaan perusahaan/usaha hortikultura lainnya yang telah dilakukan pengecekan ke BPS Provinsi.
5. Petugas pencacahan melakukan pencacahan kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI berdasarkan direktori yang sudah di*update*

4.2 Pencacahan

Dari hasil identifikasi status perusahaan maka staus perusahaan yang aktif, tutup sementara/tidak ada kegiatan, belum berproduksi dan baru akan dilakukan pencacahan lengkap dengan menggunakan kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI tahun 2018 oleh Koordinator statistik Kecamatan (KSK) atau staf BPS Kabupaten/Kota.

Tahapan pencacahan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya sebagai berikut :

1 . Pengecekan lapangan dan pencacahan perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau staf BPS Kabupaten/Kota. Petugas pencacah mengunjungi perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang terdapat dalam direktori yang sudah dimutakhirkan sebagai pedoman pencacahan.
2 . Petugas pencacah bertemu dengan pegawai/staf Perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya untuk menjelaskan maksud kedatangannya serta memberikan kuesioner sesuai dengan status perusahaan, jika perusahaan hortikultura yang berbadan hukum maka dicacah dengan kuesioner VP-Horti sedangkan jika usaha hortikultura lainnya dicacah dengan kuesioner VN-Horti. Selanjutnya petugas membuat perjanjian untuk mengambil kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI tersebut.
3 . Petugas pencacah mengambil kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada saat penyerahan kuesioner.

4 . Sebelum meninggalkan perusahaan/usaha hortikultura lainnya, pencacah memeriksa kelengkapan isian dan konsistensi dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI.

5 . Pencacah menyerahkan dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI ke pengawas.

4.3 Pengawasan

4.3.1. Pengawasan yang Bersifat Koordinatif

Kegiatan pengawasan lapangan dan pemeriksaan dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lapangan. Upaya/niat dari para petugas pemeriksa untuk lebih perhatian dalam pengawasan lapangan dan pemeriksaan daftar merupakan hal yang cukup penting untuk menjaga kualitas. Dalam VP-HORTI dan VN-HORTI , monitoring dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat lapangan dengan menggunakan aplikasi web monitoring sesuai dengan otorisasi user yang ditetapkan, sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh petugas pemeriksa. Monitoring dilakukan untuk progres kegiatan maupun hasil pendataan yang sedang berjalan. Prinsip pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksa dalam rangka mendapatkandata yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (reliable) dan yang akurat (valid), serta tuntas (clean) di lapangan. Hal-hal yang dipantau dalam pengawasan diarahkan pada kedisiplinan menjalankan semua prosedur, metode, dan jadwal pencacahan. Hal-hal yang dicermati dalam pemeriksaan isian dokumen adalah kelengkapan, kewajaran isian, tata cara pengisian, serta ketelitian dan konsistensi isian. Dengan pengawasan dan pemeriksaan, diharapkan diperoleh data yang akurat dan benar.

Tim pengawas tingkat pusat terdiri dari Subject Matter dan unit kerja terkait di BPS. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai SOP dari BPS ke BPS provinsi dan BPS Kabupaten.

4.3.2. Pengawasan yang Bersifat Teknis Oleh Pemeriksa

Dalam kegiatan lapangan VP-HORTI dan VN-HORTI , pemeriksa mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: koordinasi, pengawasan, dan pemeriksaan hasil.

Fungsi pemeriksa sebagai koodinator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksa adalah koordinator/pimpinan pencacah yang bertindak untuk dan atas nama BPS, secara khusus dalam lingkup kegiatan VP-HORTI dan VN-HORTIdi wilayah tugasnya.
b. Pemeriksa berada pada garis paling depan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Konsekuensi sebagai pimpinan adalah harus mengenal dengan baik setiap anggotanya. Secara struktur, pencacah adalah bawahan langsung pemeriksa.
c. Pemeriksa harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat (kepala desa/lurah atau ketua satuan lingkungan setempat/SLS).
d. Pemeriksa mengatur waktu pencacahan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
e. Pemeriksa harus memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden.
f. Pemeriksa harus mengawasi pelaksanaan pencacahan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
g. Pemeriksa harus menyampaikan atau meneruskan instruksi kepada tim yang diperoleh dari BPS Kabupaten.

Sebagai pengawas lapangan, pemeriksa melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeriksa secara langsung melakukan pengawasan di lapangan dengan cara memantau proses pencacahan. Jika diperlukan, pemeriksa dapat mendampingi pencacah dalam melakukan wawancara di perusahaan dan/atau usaha non rumah tangga, memperhatikan bagaimana pencacah melakukan tugasnya sebagai bahan untuk memberi koreksi ataupun pujian. pemeriksa juga harus tahu mengapa pencacah yang satu lebih lambat atau lebih cepat dari yang

lainnya. Kemudian sebagai bahan petunjuk, jika ada yang mesti dikoreksi, maka pemeriksa harus dengan mudah dihubungi pencacah apabila ditemui permasalahan sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan sedini mungkin. Pemantauan terhadap pencacah harusi intensif dan terus menerus.

b. Organisasi pelaksanaan pencacahan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
c. Pemeriksa mendampingi pencacah berwawancara di rumah tangga pertama (awal pencacahan) dalam wilayah kerjanya.

Sebagai pemeriksa hasil lapangan, pemeriksa harus melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang mencakup kelengkapan dan kebenaran pengisian, kewajaran isian dan konsistensi isian antar pertanyaan.

4.4 Editing Coding

Setelah kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI diisi oleh perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya maka BPS Kabupaten/Kota melakukan *editing coding* dengan tujuan untuk mengecek konsistensi dan kewajaran setiap isian dari kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI. Setelah dokumen *clean*, BPS Kabupaten/kota mengirim kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI ke BPS Provinsi untuk dilakukan entry.

4.5 Entry

Entry kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI dilakukan di BPS Provinsi dengan menggunakan program aplikasi pengolahan dan monitoring dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI. Hasil backup *database* dari BPS Provinsi dikirimkan ke BPS RI untuk dilakukan *merge* dan *revalidasi* serta untuk dilakukan pengolahan lanjutan.

4.6 Publikasi

Dengan program yang sama BPS melakukan penerimaan/absensi perusahaan yang telah dientri oleh BPS Provinsi, apakah perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya tersebut aktif, tutup sementara/tidak ada kegiatan, belum berproduksi, tidak ditemukan, alih usaha non hortikultura, bukan usaha

hortikultura/tutup, baru (Horti), atau baru (Bukan Horti) serta memeriksa kembali hasil entry dari BPS Provinsi apakah semua isian dalam kuesioner sudah konsisten.

BPS membuat publikasi perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya skala nasional. Perusahan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang tercakup dalam publikasi adalah perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya yang aktif, baru, tutup sementara dan non respon.

Publikasi statistik perusahaan hortikultura ini menyajikan jumlah perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya, direktori perusahaan berbadan hukum, direktori usaha hortikultura lainnya dan lain-lain .
Diharapkan publikasi perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya dapat digunakan sebagai kerangka dasar (frame) kegiatan sensus dan survei selanjutnya dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan baik dalam lingkup perusahaan/usaha hortikultura lainnya maupun lingkup kementrian/lembaga terkait.

PENGELOLAAN INSTRUMEN 5

5.1 Jenis Perlengkapan

Perlengkapan petugas adalah direktori dan kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI tahun 2018, tanda pengenal, dan surat tugas. Pada saat pelaksanaan lapangan, petugas harus membawa surat tugas dan tanda pengenal.

5.2 Pengelolaan

BPS Kabupaten/Kota sebaiknya segera melakukan editing serta pemeriksaan isian antar blok pada kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI serta mengirim kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI ke BPS Provinsi. Begitu pula dengan BPS Provinsi segera melakukan entry kuesioner VP-HORTI dan VN-HORTI serta mengirim data ke BPS RI.

5.3 Hasil Pencacahan

Hasil pencacahan perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya adalah dokumen VP-HORTI dan VN-HORTI Tahun 2019

Tabel. Unit kerja dan Tata Kelola

Unit Kerja	Tata Kelola	Keterangan
BPS Kabupaten/ Kota	1. Direktori Perusahaaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2. Kuesioner VP-HORTI 3. Kuesioner VP-HORTI	
BPS Provinsi	1. Direktori Perusahaaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2. Kuesioner VP-HORTI 3. Kuesioner VN-HORTI	
BPS RI	1. Data base Perusahaaan Hortikultura dan usaha Hortikultura Lainnya 2. Program Aplikasi Perusahaaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya	

6 PENUTUP

6.1 Penutup

Pencacahan perusahaan hortikultura dan usaha hortikultura lainnya merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam survei ada konsep dan definisi yang harus dipahami. Semua proses pengumpulan data itu bermuara pada prinsip upaya maksimal agar semua perusahaan hortikultura dan usa hortikultura lainnya selesai dicacah sesuai prosedur.

Survei ini akan menghasilkan data yang baik jika dan hanya jika semua petugas melaksanakan tugasnya masing-masing dengan disiplin, cermat, dan tekun. Petugas yang terampil berwawancara bisa membangun rasa percaya responden, bahwa keterangan yang diberikannya aman bagi dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat umum, bangsa, dan negara.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810281-4, Fax: 021 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id